Analisis Efisiensi Transparansi Akuntabilitas BLUD Dalam Pengelolaan Pendapatan Keuangan Sekolah: Studi Kasus Di Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda

Ricky Fadli Romadhoni [1], Sunarto [2], Ahmad Sirri [3]
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : rickyfadli@smkn1samarinda.sch.id

Keywords *:*
BLUD, Akuntansi Sektor Publik, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Sekolah

ABSTRACT
Penelitian memiliki rumusan masalah yaitu apakah Badan Layanan Umum Daerah dapat diterapkan pada setiap instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD sekolah SMK Negeri 1 Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan sampel penelitian mencakup SMK Negeri 1 Samarinda, dengan pengambilan sampel menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda yaitu 92% "efektif", Transparansi pengelolaan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda yaitu 138% "sangat efektif", dan Akuntabilitas pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda yaitu 92% "efektif". Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam mengelola pendapatan keuangan dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan sekolah secara menyeluruh.

PENDAHULUAN

Konsep dan penerapan program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lembaga pendidikan atau lembaga pemerintah, setidaknya ada dua landasan utama yang harus diperhatikan: 1) Penganggaran berbasis kinerja dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengangguran Berbasis Kinerja (Anonim, 2003) dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69 (Anonim, 2004) yang menyatakan "Memberikan arahan baru bagi lembaga pemerintah yang mungkin menerima tugas pokok dan fungsi pokoknya untuk mampu menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas." Pemerintah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam kedua undang-undang tersebut.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Samarinda adalah sekolah yang satu-satunya di kota Samarinda yang mengadopsi pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Pengadopsian BLUD di SMKN I Samarinda dapat memperbaiki kinerja program-program sekolah, melalui BLUD dalam pengelolaan keuangan lebih fleksibel sehingga sekolah lebih optimal lagi dalam pengelolaan program yang sudah direncanakan. Kehadiran BLUD di sekolah ini menjadi peran penting dalam kelancaran kegiatan karena dalam penggunaan anggaran BLUD sekolah lebih bebas. BLUD memberi kesempatan kepada kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk

melakukan inovasi di sekolah tentunya yang berkaitan kegiatan program praktik SMK di semua jurusan, kurikulum, manajerial yang akan berkembang dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme.

Menurut (Setyawati & Ferdinand, 2020) Suatu bidang akuntansi yang khusus mengurus entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Tujuan utama dari ASPK adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan entitas sektor publik serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Ruang lingkup sektor publik, menurut (Wibowo & Kertati, 2024) Bidang akuntansi yang disebut akuntansi sektor publik adalah bidang yang khusus menangani entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Entitas sektor publik berbeda dengan entitas sektor swasta, karena sektor publik tidak mengutamakan keuntungan, melainkan pelayanan publik yang bermutu dan bertanggung jawab.

Beberapa contoh organisasi sektor publik yang masuk dalam akuntansi sektor publik, menurut (Wibowo & Kertati, 2024) adalah: 1. Lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen yang berada di bawahnya, seperti presiden, DPR, MPR, MA, MK, KPK, KPU, BPK, Kementerian, dan lain lain. 2. Pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, kota, desa, dan unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti dinas, badan, kantor, dan lain-lain. 3. Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, PDAM, dan lain-lain. 4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, seperti Transparency International, Greenpeace, Yayasan Dompet Dhuafa, dan lain-lain. 5. Organisasi keagamaan, seperti masjid, gereja, vihara, pura, dan lain-lain. 6. Organisasi politik, seperti partai politik, ormas, dan lain-lain. 7. Organisasi non-profit, seperti rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah, dan lain-lain. 8. Proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta, seperti proyek infrastruktur, proyek lingkungan, proyek sosial, dan lain-lain.

Badan Layanan Umum Daerah Menurut (Anonim, 2018) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efiensi dan produktivitas. Tujuan penerapan BLUD adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam pedoman penyusunan pola tata kelola menurut (Anonim, 2016) antara lain: 1. Transparansi, mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 2. Kemandirian, keadaan di mana BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan nilai-nilai etika. 3. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 4. Responsibiltas, kesesuaian pengelolaan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip prinsip organisasi yang sehat. 5. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam

memenuhi hak-hak stakeholder BLUD yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Proses pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan (Anonim, 2003) yang mana dilaksanakan melalui: "(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (4) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN, APBD dan BLUD".

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Anonim, 2004) menjelaskan bahwa: "Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen". Manajemen anggaran atau biaya sekolah merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah.

Penelitian sebelumnya (Fadli, 2019) berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah)" menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Bandar telah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pengelola keuangan BLUD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas di SMKN I Samarinda. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai **"Analisis Efisiensi Transparansi Akuntabilitas BLUD Dalam Pengelolaan Pendapatan Keuangan Sekolah: Studi Kasus di Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda"**

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Metode deskriptif kuantitatif karena karena penelitian ini bersifat menganalisis seberapa efesien transparansi dan akuntabilitas badan layanan umum daerah dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Menurut (Cicilia et al., 2019) pengertian efektif adalah suatu aksi atau pekerjaan menghasilkan dampak yang sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Menurut (Mardiyati et al., 2018) pengertian transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi yang penting dan benar.

Menurut (Sari, 2022) pengertian akuntabilitas adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau

organisasi.

Dalam melakukan penelitian pada SMK Negeri 1 Samarinda diperlukan berapa data dan informasi yang menunjang dalam pencapaian tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperlukan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Gambaran umum SMK Negeri 1 Samarinda. 2. Struktur organisasi SMK Negeri 1 Samarinda. 3. Laporan retribusi SMK Negeri 1 Samarinda. 4. Data dan informasi operasional yang menunjang penelitian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan serta informasi operasional yang menunjang penelitian ini diperoleh dari SMK Negeri 1 Samarinda.

Alat Analisis yang diperlukan untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :

1. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/aturan yang telah ditetapkan}} \text{ X } 100\%$$

(Sumber: Abdullah, 2017)

Setelah mengetahui perbandingan antara realisasi dan aturan yang telah ditetapkan, peneliti akan memberikan penilaian terhadap tingkat efisiensi badan layanan umum daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan sekolah dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 1: Kriteria Efisiensi

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

(Sumber: Abdullah, 2017)

2. Transparansi

$$\text{Transparansi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah}}{\text{Realisasi pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah}} \text{ X } 100\%$$

(Sumber: Rofika & Denny, 2019)

Setelah mengetahui perbandingan antara realisasi penerimaan dan realisasi pengelolaan, peneliti akan memberikan penilaian terhadap tingkat transparansi badan layanan umum daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan sekolah dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 2: Kriteria Transparansi

Persentase BLUD	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

(Sumber: Rofika & Denny, 2019)

3. Akuntabilitas

$$\text{Akuntabilitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah}}{\text{Target Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah}} \text{ X } 100\%$$

(Sumber: Abdullah, 2017)

Setelah mengetahui perbandingan antara hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan badan layanan umum daerah, peneliti akan memberikan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas badan layanan umum daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan sekolah dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3: Kriteria Akuntabilitas

Persentase Pengeloaan keuangan BLUD	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

(Sumber: Abdullah, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Subjek

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BLUD SMK Negeri 1 Samarinda serta sesuai dengan kriteria penelitian.

Penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Samarinda adalah untuk mengetahui Efisiensi Transparansi Akuntabilitas BLUD Dalam Pengelolaan Pendapatan Keuangan Sekolah pada Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data target realisasi anggaran dan laporan keuangan BLUD SMK Negeri 1 Samarinda. Data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Target Realisasi Anggaran (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**PENDAPATAN** Jasa Layanan	 941.994.700
No	**Uraian**	**Jumlah**

	Hibah Hasil Kerjasama APBD Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah	**941.994.700**
2	**BELANJA** **BELANJA OPERASI** Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-Lain **BELANJA MODAL** Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	 96.000.000 766.952.785 138.691.915
	Jumlah	**1.001.644.700**
	Surplus/Defisit	**-59.650.000**
3	**PEMBIAYAAN**	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

(Sumber: Rencana Anggaran BLUD SMK Negeri 1 Samarinda)

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui target realisasi Pendapatan Rp. 941.994.700, target realisasi belanja yaitu belanja pegawai Rp. 96.000.000, belanja barang dan jasa Rp. 766.952.785, belanja modal Rp. 138.691.915.

Tabel 5 Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Samarinda (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran dalam DPA	Realisasi ini
1	*2*	*3*	*4*
1	**PENDAPATAN** Jasa Layanan	 941.994.700	 863.331.100
	Hibah Hasil Kerja Sama		

No	Uraian	Anggaran dalam DPA	Realisasi ini
	Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah	941.994.700	863.331.100
2	**BELANJA** **BELANJA OPERASI** Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja lain-lain **BELANJA MODAL** Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	 96.000.000 766.952.785 138.691.915	 22.750.000 513.191.627 88.768.750
	Jumlah	1.001.644.700	624.710.377
	Surplus/Defisit	-59.650.000	238.620.723
3	**PEMBIAYAAN** **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman		
	Jumlah		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	Investasi		
	Pembayaran Pokok		
	Utang/Pinjaman		
	Jumlah		
	Pembiayaan Netto		

(Sumber: Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Samarinda)

Berdasarkan dari tabel 5 di atas diketahui pendapatan anggaran dalam DPA Rp. 941.994.700, pendapatan realisasi Rp. 863.331.100, belanja pegawai anggaran dalam DPA Rp. 96.000.000, belanja pegawai realisasi Rp. 22.750.000, belanja barang dan jasa anggaran dalam DPA Rp. 766.952.785, belanja barang dan jasa realisasi Rp. 513.191.627, belanja modal anggaran dalam DPA Rp. 138.691.915, belanja modal realisasi Rp. 88.768.750.

Analisis Badan Layanan Umum Daerah

Analisis efisiensi, transparansi, akuntabilitas badan layanan umum daerah menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan meralisasi pemungutan

sumber pendapatan keuangan sekolah SMK Negeri 1 Samarinda berdasarkan ketetapan yang ada.

Cara menghitung efisiensinya pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah menggunakan rumus

$$\text{Efisiensi BLUD} = \frac{\text{Rp. } 863.331.100}{\text{Rp. } 941.994.700} \text{x } 100\% = 92\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa efisiensi laporan berada pada kriteria efektif dimana range presentase berada pada 90 – 100%.

Cara menghitung transparansi pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah menggunakan rumus

$$\text{Transparansi BLUD} = \frac{\text{Rp. } 863.331.100}{\text{Rp. } 624.710.377} \text{x } 100\% = 138\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa transparansi laporan berada pada kriteria sangat efektif dimana range presentase berada lebih dari 100%.

Cara menghitung akuntabilitas pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah menggunakan rumus

$$\text{Akuntabilitas BLUD} = \frac{\text{Rp. } 863.331.100}{\text{Rp. } 941.994.700} \text{x } 100\% = 92\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa efisiensi laporan berada pada kriteria efektif dimana range presentase berada pada 90 – 100%.

Dampak Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

Jika dilihat dari presentase efisiensi penerimaan pendapatan keuangan BLUD sekolah yang efektif menandakan SMK Negeri 1 Samarinda berhasil mengelola badan layanan umum daerah dengan benar. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada efisiensi pengelolaan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda menunjukkan beberapa aspek penting. Pertama, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan digunakan diawasi dengan baik. Kedua, transparansi dalam laporan keuangan mendorong kepercayaan stakeholders terhadap pengelolaan dana sekolah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BLUD memainkan peran kunci. Staf yang terlatih mampu mengelola dan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk administrasi keuangan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi BLUD. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah membantu sekolah dalam mencapai target efisiensi pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penerapan BLUD yang efisien, SMK Negeri 1 Samarinda mampu mengoptimalkan penggunaan dana untuk berbagai kegiatan pendidikan dan operasional sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain dalam mengimplementasikan BLUD untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan mereka.

Jika dilihat dari presentase transparansi penerimaan dan pengelolaan keuangan BLUD sekolah yang sangat efektif menandakan SMK Negeri 1 Samarinda berhasil mengelola badan layanan umum daerah dengan benar. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat transparansi dalam pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda. Pertama, adanya kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi keuangan memungkinkan akses yang mudah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memantau dan menilai penggunaan dana sekolah. Kedua, penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit kapan saja.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan aktif pihak sekolah dalam pelaporan keuangan secara periodik kepada dinas pendidikan dan komite sekolah telah mendorong tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah daerah. Pelaporan yang transparan ini memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dan tidak ada penyalahgunaan dana. Selain itu, adanya evaluasi dan audit rutin oleh pihak independen juga memperkuat sistem transparansi. Evaluasi ini memberikan umpan balik yang berguna untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kepercayaan publik, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, model transparansi ini bisa dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mengimplementasikan BLUD dengan tujuan meningkatkan pengelolaan keuangan mereka.

Jika dilihat dari presentase akuntabilitas penerimaan pendapatan keuangan BLUD sekolah yang efektif menandakan SMK Negeri 1 Samarinda berhasil mengelola badan layanan umum daerah dengan benar. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti beberapa faktor yang mendukung tingginya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda. Pertama, penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dana dapat dilacak dan diaudit dengan mudah. Selain itu, peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah, dalam proses pengelolaan keuangan juga sangat penting. Partisipasi aktif mereka memastikan bahwa semua keputusan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa audit internal dan eksternal yang rutin dilakukan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Audit ini memberikan umpan balik yang berharga dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga memainkan peran kunci. Sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan pemantauan dan pelaporan keuangan yang lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga menjadi contoh yang dapat ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Model akuntabilitas ini membantu meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpul bahwa efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah dikatakan efektif. Yang berarti bahwa dengan penerapan BLUD yang efisien, SMK Negeri 1 Samarinda mampu mengoptimalkan penggunaan dana untuk berbagai kegiatan pendidikan dan operasional sekolah. Transparansi pengelolaan keuangan BLUD sekolah dikatakan sangat efektif. Yang berarti bahwa transparansi dalam pengelolaan pendapatan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Samarinda tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kepercayaan publik, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan keuangan BLUD sekolah dikatakan efektif. Yang berarti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Memberikan umpan balik yang berharga dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Saran

1. Bagi SMK Negeri 1 Samarinda, diharapkan agar dapat mempertahankan pengelolaan keuangan BLUD sekolah dengan benar untuk tahun selanjutnya. Serta lebih optimal dari anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran.
2. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk mengembangkan pada tahun yang akan datang, menghitung rencana anggaran serta realisasi anggaran, serta mempertimbangkan objek maupun variabel penelitian yang berbeda.

REFERENCES

Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja*, *8*(2), 209–210.

Anonim. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIII tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Anonim. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penganggaran berbasis kinerja*.

Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan 69*.

Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Anonim. (2016). *Pengantar mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2016*.

Anonim. (2018). *Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 1 angka I Tentang Badan Layanan Umum Daerah*.

Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). *ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA*. *17*, 302.

Fadli, N. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah). *Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh.*

Mardiyati, U., Qothrunnada, Q., & Kurnianti, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012 Â€“ 2016. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, *9*(1), 105–124.

Rofika, & Denny. (2019). Pengembangan Modul Berbasis Pendekatan Kontekstual Materi Peluang untuk Tingkat SMA Kelas XI Jurusan IPS. *Master Thesis*.

Sari, P. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS PADA SLB NEGERI 2 DENPASAR. *Jurnal Akuntansi*, *11(1)*, 103–117.

Setyawati, V. ., & Ferdinand, D. Y. . (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*, *2017*, 684–691.

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2024). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, *5*(1), 239–257.